



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 196 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah meneliti, menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2006);

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 31 Oktober 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dalam tahun berjalan terdapat Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat mendesak/darurat atas usulan Legislatif maupun Eksekutif yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat dibahas tanpa harus melakukan perubahan/penambahan terhadap Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H

Tembusan :

1. Pj . Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
 NOMOR : 196
 TAHUN : 2023
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISEKAIT		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAILAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Perubahan alokasi program dan penganggaran kegiatan tahun 2024	-	√	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan III	Perda wajib
2	Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan III	Perda wajib
3	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Alokasi program dan penganggaran kegiatan tahun 2025	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-	√	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Triwulan IV	Perda wajib
4	Peraturan Daerah	Jaringan Utilitas	Pengaturan penataan ruang melalui perencanaan penempatan jaringan utilitas dan prioritas SJUT, alternatif mekanisme penyediaan, tarif layanan SJUT, bentuk-bentuk perizinan, jaminan pelaksanaan atau perbaikan, pengusulan lembaga, pengawasan jaringan utilitas, kewajiban penyelenggara utilitas terkait relokasi, sanksi administratif dan sanksi pidana	√	-	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang	√	-	Dinas Bina Marga	Triwulan I	Propemperda Tahun 2023 (Proses pembahasan di Bapemperda)

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1					5						
5	Peraturan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah (EMID)	Seluruh aktivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang akan mencakup Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	√	-	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Triwulan I	Propemperda Tahun 2023 (Proses pembahasan di Bapemperda)
6	Peraturan Daerah	Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLSE)	Manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan, ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum, serta kualitas lingkungan	√	-	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi	√	-	Dinas Perhubungan	Triwulan I	Propemperda Tahun 2023 (Proses pembahasan di Bapemperda)
7	Peraturan Daerah	Rencana Induk Transportasi	Perencanaan sistem transportasi baru dalam rangka menunjang dan menggerakkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta	√	-	Delegasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 Tentang RTT Jabodetabek	√	-	Dinas Perhubungan	Triwulan I	Propemperda Tahun 2023 (Proses pembahasan di Bapemperda)

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1					5					9	
8	Peraturan Daerah	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengaturan tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), SPALD-T, tugas dan wewenang Pemda, hak dan kewajiban, kelembagaan, pembiayaan, kerja sama, perizinan, tarif, insentif, pembinaan dan pengawasan, data dan informasi, kompetensi, larangan, sanksi pidana, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan peralihan	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	Dinas Sumber Daya Air, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Triwulan I	Propemperda Tahun 2023 (Proses pembahasan di Bapemperda)
9	Peraturan Daerah	Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara	Perda sudah tidak relevan dengan nomenklatur pembagian wilayah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	√	-	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	√	-	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Triwulan I	Propemperda Tahun 2023 (Sudah disampaikan ke DPRD)
10	Peraturan Daerah	Kawasan Tanpa Rokok	Pengaturan kawasan tanpa rokok, hak dan kewajiban, penandaan, pembinaan dan pengawasan, peran masyarakat dan sanksi	√	-	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	√	-	Dinas Kesehatan	Triwulan I	Propemperda Tahun 2023 (Sudah disampaikan ke DPRD)

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAILAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	-	5	6	7	8	9	10	
11	Peraturan Daerah	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Mengatur tata ruang wilayah provinsi yang memuat perencanaan struktur dan pola ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah (Mer revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030)	-	√	Delegasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	√	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Triwulan I	Propemperda Tahun 2023 (Sudah disampaikan ke DPRD)
12	Peraturan Daerah	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi	√	-	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	√	-	Badan Pendapatan Daerah	Triwulan II	Propemperda Tahun 2023 (Sudah disampaikan ke DPRD)
13	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Sistem Pangan	Menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan aman, menjamin stabilitas ketersediaan pangan pokok dan strategis/ penting, memastikan kelancaran logistik dan distribusi pangan, menciptakan kondisi kondusif bagi usaha dalam alur sistem pangan/rantai pasok agribisnis pangan, kemudahan akses bagi kelompok rawan/rentan pangan dan gizi, mendorong terpenuhnya kecukupan gizi perseorangan/masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif	√	-	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan	√	-	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Triwulan I	Propemperda Tahun 2023 (Sudah disampaikan ke DPRD)

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAILAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
14	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Industri Provinsi DKI Jakarta 2023-2043	Perencanaan industri yang mandiri, berdaya saing, maju, berwawasan lingkungan, berbasis teknologi informasi (digital) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang	√	-	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	√	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Triwulan II	Propemperda Tahun 2023 (Sudah disampaikan ke DPRD)
15	Peraturan Daerah	Rumah Susun	Pembinaan, Perencanaan, Pembangunan, Penguasaan pemilikan, Pemanfaatan, Pengelolaan, Peningkatan Kualitas, Pengendalian, Kelembagaan, Tugas dan wewenang, Hak dan Kewajiban, Pendanaan/ sistem pembiayaan dan Peran Serta Masyarakat sekaligus mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di DKI Jakarta	√	-	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	√	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Triwulan II	Propemperda Tahun 2023

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
16	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan	<p>Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan, jaminan ketersediaan daya tampung tiap jenjang pendidikan, pemerataan pendidikan antar wilayah melalui Zona Layanan Satuan Pendidikan (ZLSP), pencapaian standar layanan mutu pendidikan (mutu pendidikan, akreditasi, peningkatan kualitas guru), pembiayaan (pemberian subsidi bagi siswa yang tidak mampu baik di sekolah negeri maupun di swasta, pemungutan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga yang mampu di sekolah negeri</p> <p>- Materi Ranperda Penyelenggaraan Pesantren</p> <p>- link and match, kolaborasi usulan DPRD DKI Jakarta</p>	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional	√	-	Dinas Pendidikan	Triwulan III	Propemperda Tahun 2023
17	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Mengatur penyelenggaraan bantuan hukum di Provinsi DKI Jakarta	√	-	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	√	-	Biro Hukum	Triwulan II	Propemperda Tahun 2023
18	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi DKI Jakarta	Penyesuaian substansi maupun materi Peraturan Daerah yang sudah tidak mampu mengakomodir dalam menjawab permasalahan hukum di DKI Jakarta	-	√	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	Satuan Polisi Pamong Praja	Triwulan II	Propemperda Tahun 2023
19	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit	Perubahan ketentuan pengaturan modal dasar dan ruang lingkup perseroan	-	√	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	√	-	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan III	Propemperda Tahun 2023

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
20	Peraturan Daerah	Facilitasi Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan, dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika	Mengatur ruang lingkup Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)	√	-	Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024	√	-	Badan Kesatuan Kesebangsaan dan Politik	Triwulan II	Propemperda Tahun 2023
21	Peraturan Daerah	Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan)	Pendirian PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) menjadi Badan Usaha Milik Daerah	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	√	-	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan I	Propemperda Tahun 2023
22	Peraturan Daerah	Penyertaan Modal Daerah kepada PT JIEP	Pemberian PMD pada JIEP	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	√	-	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan I	Usulan Baru (digabung dengan Ranperda pendirian PT JIEP)
23	Peraturan Daerah	Pengelolaan Air Minum	Wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, pelaku usaha dan badan hukum, pengelolaan air bersih/ minum, perizinan, sanksi	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	Dinas Sumber Daya Air	Triwulan II	Propemperda Tahun 2023
24	peraturan Daerah	Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Transjakarta Menjadi Perseroan Terbatas	Perubahan terkait ketentuan modal dasar dan ruang lingkup perseroan	√	-	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	√	-	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Triwulan I	Propemperda Tahun 2023

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
25	Peraturan Daerah	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Provinsi DKI Jakarta [Ranperda Kemudahan Berusaha dipisahkan karena materi muatan berbeda dan akan diusulkan menunggu UUDKJ]	Mengatur mengenai arah dan tujuan insentif dan kemudahan investasi di Provinsi DKI Jakarta Penyesuaian kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut	√	-	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Daerah	√	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pulu	Triwulan II	Propemperda Tahun 2023
26	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jakarta Tahun 2025 - 2045	Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang (periode 20 tahun) yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	√	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan, seluruh Perangkat Daerah	Triwulan III	Usulan Baru

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIS	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1					5			7		9	10
27	Peraturan Daerah	Penguatan Ideologi Pancasila	<p>- Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup bangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>- peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Jakarta yang menjawai Pancasila</p>	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-		Badan Kesatuan Kesebangsaan dan Politik	Triwulan III	Usulan Baru
28	Peraturan Daerah	Pemajuan Kebudayaan Betawi	Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	√	-	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	-		Dinas Kebudayaan	Triwulan II	Usulan Baru
29	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga	Mengatur ruang lingkup fungsi dan tanggung jawab keluarga dalam pelaksanaan delapan fungsi keluarga, meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga	√	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	-		Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Triwulan IV	Propempera Tahun 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,

H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.